

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang “Pendirian Bangunan untuk Rumah Tinggal di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sleman, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan untuk Kecamatan Sleman sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal mereka. Berdasarkan hasil penelitian didapati sebanyak 63,33% masyarakat sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang tidak memiliki IMB sebanyak 36,67%. Maka dengan ini dapat membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB dalam mendirikan bangunan, khususnya untuk rumah tinggal cukup tinggi. Dan untuk pendirian bangunan untuk rumah tinggal sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Yaitu bahwa kecamatan Depok, kecamatan Mlati dan kecamatan Sleman merupakan daerah untuk sektor dibidang permukiman.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan IMB dalam melakukan pembangunan, khususnya untuk rumah tinggal adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang IMB. Ini disebabkan karena belum adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah daerah setempat

sampai ketingkat lapisan masyarakat yang paling bawah, yaitu tingkat RT maupun RW.

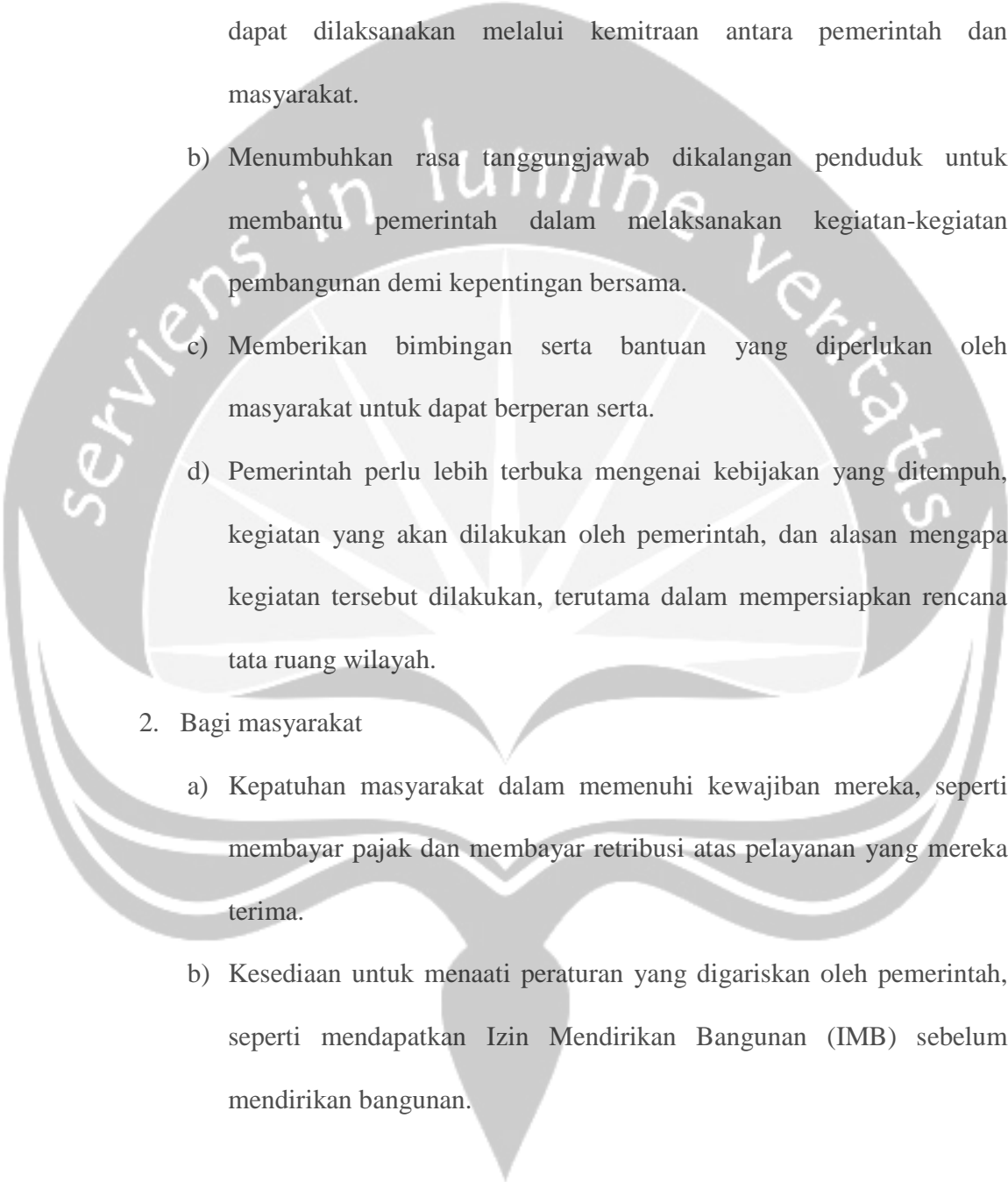
- 2) Belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah daerah setempat bagi masyarakat yang belum mendaftar atau mengurus IMB untuk bangunan dan rumah tinggal mereka.
- 3) Masyarakat belum mengetahui arti pentingnya IMB. Karena dengan mereka memiliki IMB berarti mereka telah memenuhi standar dalam melakukan pembangunan dan juga sebagai warga negara yang baik karena telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dan untuk penggunaan tanah untuk rumah tinggal di kecamatan Depok, kecamatan Mlati dan kecamatan Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Yaitu bahwa kecamatan Depok, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Sleman merupakan wilayah permukiman di Kabupaten Sleman, hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

- 
- a) Menyediakan informasi tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
  - b) Menumbuhkan rasa tanggungjawab dikalangan penduduk untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan demi kepentingan bersama.
  - c) Memberikan bimbingan serta bantuan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat berperan serta.
  - d) Pemerintah perlu lebih terbuka mengenai kebijakan yang ditempuh, kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, terutama dalam mempersiapkan rencana tata ruang wilayah.

## 2. Bagi masyarakat

- a) Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti membayar pajak dan membayar retribusi atas pelayanan yang mereka terima.
- b) Kesiediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah., Et all,1990, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Bineka Cipta, Jakarta.
- A. P. Palindungan, 1993, *Komentat atas Undang-undang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992)*, Mandar Maju: Bandung.
- Choirul Narbuko., Et all, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Alumni : Bandung.
- Hartono Hadisoeparto, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- M. Musa dan Titi Nurfitri, 1988, *Metodologi Penelitian*, CV. Fajar Agung: Jakarta.
- Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi*, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- Pelayanan Site Plan*, Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 2008.
- Pelayanan SKBLT*, Kedaulatan Rakyat, 18 Desember 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 5/Kep. KHD./A/2003 tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Keputusan Bupati Sleman Nomor 07a/Kep. KDH/A/2004 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan.



# LAMPIRAN

## **SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Mengambil formulir di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT PSA) Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman Telepon 868405 Pesawat 240.
2. Formulir diisi dan ditanda tangani di atas meterai Rp. 6.000,-
3. Formulir dilegalisir desa dari kecamatan dimana bangunan akan didirikan.
4. Foto copy KTP yang masih berlaku.
5. Lampiran-lampiran yang diperlukan (masing-masing rangkap 2).
  - a. Gambar : denah, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, potongan memanjang, potongan melintang rencana pondasi, rencana atap, jaringan sanitasi, situasi dan situasi kecil.
  - b. Gambang konstruksi beton beserta hitungannya.
  - c. Gambar Konstruksi baja beserta perhitungannya.
  - d. Hasil penyelidikan tanah dan rekomendasi dari Laboratorium Mekanika Tanah untuk bangunan bertingkat 3 (tiga) atau lebih.
  - e. Surat keterangan pemilikan tanah.
  - f. Surat Perintah Kerja (SPK) apabila pekerjaan diborongan.
6. Memenuhi Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Formulir yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke UPT PSA dan pemohon akan mendapat tanda terima.
8. Pemohon akan diberitahu permohonan disetujui atau ditolak
9. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di UPT PSA.

# PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Permohonan untuk : membangun, memperluas, merubah

1. Nama dan alamat pemohon : .....
2. Nama dan alamat pemilik bangunan : .....
3. Nama dan alamat pemilik tanah : .....
4. Jenis Bangunan \*) : Rumah tinggal, Kantor, Sekolah, Asrama, Toko, Gudang, Pabrik, Laboratorium, Bengkel, Gedung Kuliah, Masjid Gereja, Rumah Makan, Hotel, Motel, Pemandokan, .....
5. Lokasi Bangunan : .....
6. Nama dan alamat penggambar : .....
7. Nama dan alamat pemborong : .....
8. Jumlah lantai : .....
9. Bahan konstruksi
  - a. pondasi \*) : batu bata/ batu kali / plat beton / tiang pancang
  - b. dinding : bambu / papan / batu bata / batako / precast
  - c. kusen : kayu kalimantan / kayu jati / aluminium
  - d. rangka atap : bambu / kayu / beton / baja
  - e. penutup atap : ijuk / seng / asbes / vlam / beton / ondoline / genteng
  - f. lantai : tanah / bambu / kayu / semen / tegel abu-abu / teraso / keramik / granit / marmer

Mengetahui :  
Camat

Mengetahui :  
Kepala Desa

Pemohon

Materai  
Rp. 6.000

\*) Coret yang tidak perlu



# SURAT PERNYATAAN

Sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor : 05 / Instr. KDH / 1991 tertanggal 27 April 1991,  
tentang : Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan bagi pemohon Izin Bangunan

Dengan ini kami,

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan sanggup membuat Sumur Peresapan Air Hujan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
yang akan kami laksanakan bersama-sama dengan pembuatan gedung yang kami mohonkan izin.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Tgl.  
Yang menyatakan  
Pemohon IMB

Materai  
Rp. 6.000

( ..... )



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PERMUKIMAN, PRASARANA WILAYAH DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Magelang Km. 10, Sleman 55511 Yogyakarta  
telepon (0274) 868501 faximili (0274) 869472

**P. IMB**  
**SP. 10**

**SYARAT-SYARAT UNTUK PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Mengambil formulir permohonan di kantor Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT - PSA) Jln. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Telp. 868405, Pesawat 240.
2. Formulir permohonan diisi dan ditandatangani oleh pemohon serta diberi materai Rp. 6.000,- (satu asli)
3. Formulir permohonan dilegalisir di dusun dan desa tempat bangunan didirikan.
4. Tanah tempat bangunan didirikan jenis **PEKARANGAN**
5. Formulir permohonan diserahkan kembali ke Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT - PSA), dengan disertai lampiran-lampiran (masing-masing rangkap dua).
  - a. Foto copy Surat Tanah atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Pemerintah Desa.
  - b. Gambar Situasi letak bangunan dan tampak bangunan.
  - c. Surat pernyataan tentang konstruksi bangunan. (SP. 30)
  - d. Surat Kerelaan dari pemilik tanah, apabila tempat bangunan didirikan bukan milik pemohon (SP. 40)
  - e. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- kepada seorang penduduk DIY apabila pemohon berdomisili di luar DIY. (SP.. 40)
  - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemilik Bangunan.
6. Bangunan tidak melanggar ketentuan-ketentuan :
  - a. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1978 tentang Garis Sempadan.
  - b. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Pembangunan.
  - c. Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
7. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada UPT - PSA atau ke seksi Perizinan Dinas Kimpraswilhub Kabupaten Sleman.

**Sleman,**  
**Dinas Kimpraswilhub**  
**Kabupaten Sleman**



## PERMOHONAN PEMUTIHAN IMB

### Permohonan Pemutihan Bangunan

Nama dan alamat pemohon : .....

Nama dan alamat pemilik bangunan : .....

Nama dan alamat pemilik tanah : .....

Jenis bangunan : Rumah tinggal, Kantor, Sekolah, Toko, Asrama, Pabrik, Laboratorium, Bengkel, Masjid, Gereja, Rumah makan, Hotel, Pemandokan.

Lokasi bangunan : .....

Luas tanah : .....

Luas bangunan : .....

Konstruksi : .....

a. Pondasi : .....

b. Dinding : .....

c. Rangka atap : .....

d. Atap : .....

e. Lantai : .....

Dibangun pada bulan dan tahun : .....

Sleman,

Mengetahui  
Kepala Desa

Mengetahui  
Kepala Dusun

Pemohon

Materai  
Rp. 6.000

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Pemilik tanah Persil Nomor : ..... Luas ..... M<sup>2</sup>

Menyatakan tidak berkeberatan bahwa di tanah milik saya tersebut seluas ..... M<sup>2</sup>

didirikan bangunan ..... oleh .

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal .....

Yang menyatakan,

Yang menyatakan,  
Pemilik tanah

Materai

( ..... )

( ..... )

Mengetahui  
Lurah Desa

( ..... )

## **SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Memberi KUASA SEPENUHNYA kepada :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Untuk mengurus pemutihan IMB, samapi selesai untuk bangunan milik saya yang terletak di

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

Materai

( ..... )

( ..... )

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Lurah Desa .....  
Kabupaten Sleman.  
dengan ini menyatakan bahwa :

Sebidang tanah jenis : .....  
Buku C. Nomor : .....  
Persil Nomor : .....  
Kelas : .....  
Luas Tanah : ..... M<sup>2</sup> .....  
Terletak di Dusun : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Dengan batas-batas  
Utara : .....  
Timur : .....  
Selatan : .....  
Barat : .....

Adalah benar-benar milik Sdr. : .....

Alamat : .....

Tnah tersebut tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai pemiliknya maupun batas-batasnya

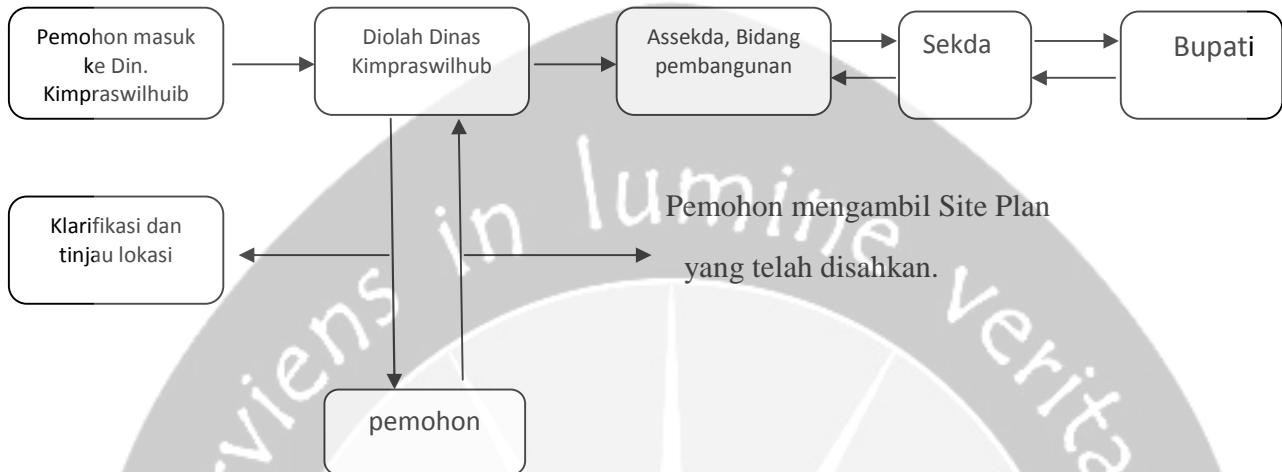
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman : .....  
Nomor :        /        / .....  
Lurah Desa.....

( ..... )

## Prosedur Pelayanan SITE PLAN

### Untuk Luas Tanah $\geq 1$ Ha



### Untuk Luas Tanah $< 1$ Ha

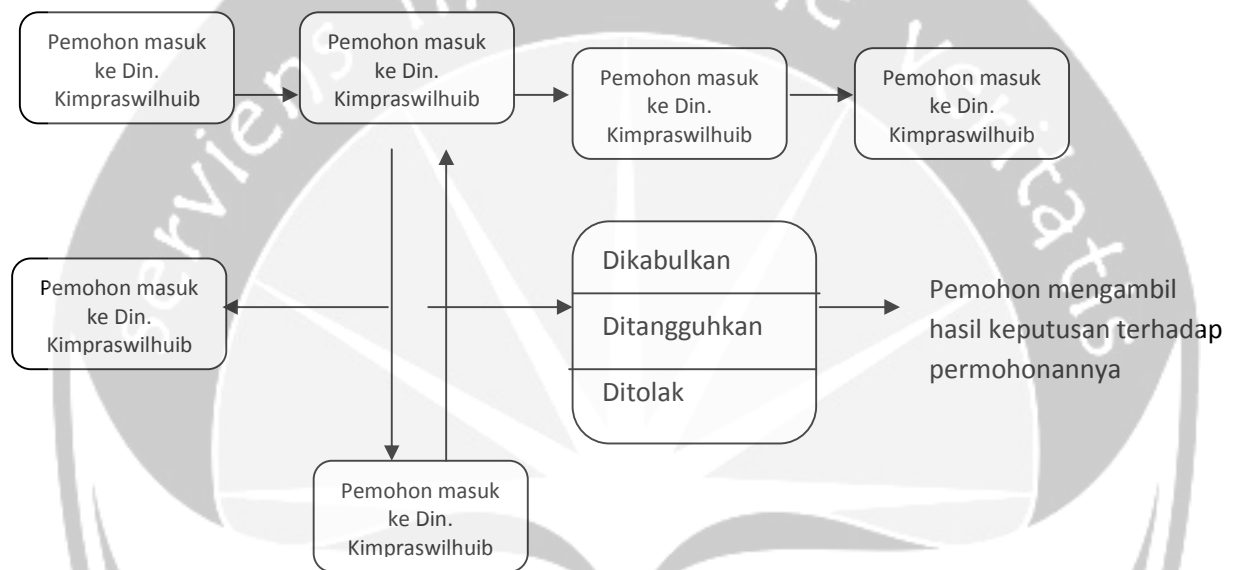


### Persyaratan SITE PLAN :

- Foto kopi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- Foto kopi Tanda Pembayaran Retribusi IPPT;
- Foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- Foto kopi surat Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat;
- Gambar Site Plan;

- Denah Lokasi Pembangunan;
- Peta Batas Kepemilikan Tanah;
- Rekomendasi yang harus dimiliki dari Instansi terkait.

### Mekanisme Permohonan SKBLT



### Syarat permohonan SKBLT :

- Foto kopi Surat Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat;
- Foto kopi KTP Pemilik yang masih berlaku;
- Surat Tugas/Kuasa;
- Foto kopi KTP Pemegang Surat Tugas/Kuasa;
- Gambar Site Plan/Tapak Bangunan Skala min 1:250;
- Denah lokasi.